



Pidato Kunci

SISTEM AMONG PENDIDIKAN TAMANSISWA

Sri-Edi Swasono

Ketua Umum Majelis Luhur Tamansiswa

Tamansiswa didirikan oleh Raden Mas Soewardi Soerjaningrat di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922. “Raden Mas” adalah gelar kebangsawanan sebagai seorang aristokrat dari Kerajaan Paku Alam.

Soewardi Soerjaningrat (2 Mei 1889 – 26 April 1959) dikenal sebagai seorang pejuang kemerdekaan Indonesia, dari sejak Indonesia masih disebut sebagai *Nederlands-Indië* atau Hindia-Belanda melalui keanggotaannya pada *Indische Partij* (partai politik pertama) di Hindia-Belanda pada tahun 1912. *Indische Partij* dikenal sebagai partai politik pertama yang berani mencantumkan tujuan “Hindia-Belanda Merdeka” (saat itu istilah “Indonesia” belum dikenal). Kegiatan politiknya yang anti penjajahan Belanda (*anti Dutch colonization*) membuat Soewardi Soerjaningrat dibuang ke Nederland, menjadi orang buangan (*internee*) di sana sejak tahun 1913 sampai 1919.

Kembali ke Hindia-Belanda Soewardi Soerjaningrat pada tahun 1928 (genap berusia 40 tahun) Soewardi Soerjaningrat melepaskan gelar kebangsawanan “Raden Mas”-nya dan berganti nama menjadi Ki Hadjar Dewantara, sebagai seorang “pendekar

pendidikan”. Gelar “Ki” menegaskan sikap egaliter (*egalitarian*) bahwa semua orang adalah sederajat.

Ki Hadjar meneruskan perjuangannya mencapai kemerdekaan Indonesia melawan penjajah Belanda dan Jepang. Pada tahun 1942 Ki Hadjar bersama Soekarno, Mohammad Hatta dan Kyai Haji Mas Mansyoer mendirikan “Pusat Tenaga Rakyat” di zaman penjajahan Jepang guna melindungi rakyat Indonesia dari kekejaman fasis Jepang. Pada tahun 1944 Tamansiswa dibubarkan oleh Pemerintah Jajahan Jepang.

Setelah Indonesia Merdeka melalui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Ki Hadjar ikut menjadi anggota badan perumus Konstitusi Indonesia¹⁾, khususnya Ki Hadjar ikut menyusun *draft* Pasal 31 Konstitusi Indonesia mengenai Pendidikan Nasional. Selanjutnya Ki Hadjar menjadi Menteri Pengajaran yang pertama pada awal kemerdekaan Indonesia. Ki Hadjar kemudian menerima penghargaan dari Negara sebagai “Bapak Pendidikan Nasional Indonesia” dan sebagai “Pahlawan Nasional”.

Tamansiswa didirikan yang pada 3 Juli 1922 itu menetapkan 7 Asas (*basic principles*). Saya tidak akan menyebutkan kesemua 7 Asas itu, hanya akan saya sebutkan 2 saja di antara yang 7 itu, yang berkaitan dengan sistem pendidikan khas Tamansiswa, kita menyebutnya sebagai “sistem among” (*among system*) Kedua Asas itu: (1). Seseorang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri, dengan mengingat tertib damainya persatuan dalam berperikehidupan umum. Oleh karena itu pendidikan yang beralaskan “paksaan”, “hukuman” untuk mencapai “ketertiban” dianggap Tamansiswa sebagai memperkosa hidup kebatinan

¹⁾ Yang dimaksud adalah Anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan Anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

anak. Pendidikan adalah memelihara dengan sebesar-besar perhatian untuk tumbuhnya anak lahir dan batin menurut kodratnya sendiri, dan ini dinamakan sebagai “sistem among”; (2). Dengan tidak terikat lahir atau batin, serta tulus suci hati, Tamansiswa menegaskan perlunya berdekatan dengan Sang Anak. Kita tidak meminta sesuatu hak dari Sang Anak, akan tetapi menyerahkan diri dan berhamba kepada Sang Anak.

Dari kedua butir di atas, Tamansiswa menegaskan peran mulia dari guru kepada murid, yaitu berperan melaksanakan “sistem among”. Artinya “guru” adalah “pamong” dan murid adalah “sang anak”. Dengan kata lain “guru” bertindak sebagai “pamong” yang memelihara tumbuhnya hidup anak, melakukan *nurturing* dan memberikan *nursery* kepada anak dengan penuh kasih sayang. Di situ guru tidak memaksa, tetapi juga tidak memanjakan. Kita perlu mencampuri kehidupan sang anak kalau ternyata si anak ada di jalan yang salah. Kita wajib mengamati agar sang anak dapat bertumbuh menurut kodratnya.

Jadi sistem among yang dikemukakan Ki Hadjar adalah *menyokong kodrat-alamnya anak-anak yang kita didik, agar dapat mengembangkan hidupnya lahir dan batin menurut kodratnya sendiri-sendiri... . Pengetahuan, kepandaian, jangan dianggap maksud atau tujuan, tetapi alat, perkakas belaka... . Buahnya pendidikan adalah matangnya jiwa yang dapat mewujudkan hidup dan penghidupan yang tertib dan suci dan bermanfaat bagi orang lain.*

Namun Ki Hadjar juga menegaskan tentang susunan pelajaran untuk pengetahuan-umum, harus ditetapkan syarat minimum “suatu daftar pelajaran”, yang menetapkan luas-tingginya pelajaran dan kepandaian umum, serta pula pendidikan budi pekerti, istimewa pendidikan semangat bekerja, kekeluargaan, kebaktian, cinta Tanah Air serta keprajuritan

(*militancy and bravery*).²⁾ Syarat minimum ini diwajibkan untuk semua sekolah.

²⁾ Sebagai Ketua Umum Majelis Luhur Tamansiswa saya menyusun pedoman dalam bentuk butir-butir, untuk pendidikan karakter berdasar “sistem among” disertai dengan pendekatan “*tut wuri handayani*”. Selanjutnya IKIP UST mendapat tugas untuk menjabarkan butir-butir itu lebih lanjut dengan narasi-narasi pedagogis yang tepat untuk pedoman mengajar bagi para pamong di ruang-ruang kelas.

Titik-tolak pengajaran adalah para guru serta para murid senang berada di sekolah, sekolah adalah taman yang menyejukan.

Butir-butir itu sebagai berikut:

◦Diawali dengan pendidikan karakter (*mindset*) cinta kepada *Ibu Pertiwi*, cinta kepada *Sang Merah Putih*, menghayati *Bhinneka Tunggal Ika – Tanhanna Dharma Mangrwa*, setia pada *Pancasila*.

◦Pendidikan untuk membentuk dan mempertegas *jati-diri*, *harga-diri* dan *percaya-diri* (*KHD: ngandel-kendel-bandel-kandel*).

◦Pendidikan membentuk sikap *humanistik*.

◦Pendidikan membentuk sikap *jujur*.

◦Pendidikan membentuk sikap *berani*.

◦Pendidikan membentuk sikap *berdisiplin*.

◦Pendidikan membentuk sikap *militant*.

◦Pendidikan mengajarkan dan mencontohkan pentingnya bersahabat, ramah, tolong-menolong (*friendly*), dan menghargai *friendliness*, saling asah-asih-asuh, *sharing*, *caring*.

◦Pendidikan membentuk sikap *entrepreneurial* (*curious, inovatif, kreatif, auto-aktif, tidak menunggu disuruh*). Mengejar *the culture of excellence* *KHD: nitèni, niroké, nambahi*.

◦Pendidikan menumbuhkan semangat menanam, tidak hanya mampu makan atau menebang (konsepsi negara agraris/*hinterland*).

◦Pendidikan berwawasan/mengarungi laut (konsepsi negara maritim).

◦Pendidikan mempertebal *iman* (*KHD: tetep-antep-mantep*).

◦Pendidikan mengajarkan dan mencontohkan pentingnya *saling menghormati*, *ber-unggah-ungguh*, *ber-sopan-santun*.

◦Pendidikan mengajarkan dan mencontohkan *persatuan dan kerukunan* serta *ber-toleransi, menghormati* dan *menghargai perbedaan*.

◦Pendidikan membentuk sikap sabar, mengendalikan emosi (*KHD: ning-neng-nung-nang*).

◦Pendidikan menumbuhkan kepekaan estetika dan artistika untuk membentuk sikap kritis, apresiatif.

◦Pendidikan membentuk karakter tangguh *digdaya* dan *mandraguna* dalam rangka *nation and character building*.

◦Pendidikan untuk memperkuat rasa Kebangsaan (nasionalisme, berkarakter cinta Ibu Pertiwi) dan memperkuat rasa Kerakyatan (bahwa tahta adalah untuk rakyat).

◦Pendidikan memantapkan kesadaran geografis (*territorial awareness*) untuk mengenal keberadaan diri/*ground zero*. Pahami peta bumi.

◦Berkesadaran sejarah (*survival awareness*) untuk memperkuat jati-diri bangsa.

◦Pendidikan “mencerdaskan kehidupan bangsa” (konsepsi budaya), tidak sekedar untuk “mencerdaskan otak bangsa” (konsepsi biologis-genetika), menghilangkan ke-

Dari apa yang dikemukakan di atas, dapat kita rasakan betapa beratnya, mulianya dan canggih (*sophisticated*)-nya tugas seorang guru. Sang guru harus mampu memadukan antara kodrat-alam Sang murid dengan apa yang diperlukan oleh masyarakat dan Ibu Pertiwi (Tanah Air negerinya).

Kodrat-alam sang anak perlu di-*reconcile* dengan *manpower development planning*. Tentang kewajiban murid untuk mencintai Ibu Pertiwi, Ki Hadjar sempat menegaskan: “...Pengajaran harus bersifat kebangsaan Kalau pengajaran bagi anak-anak tidak berdasarkan kenasionalan, anak-anak tak mungkin mempunyai rasa cinta bangsa dan makin lama terpisah dari bangsanya, kemudian barangkali menjadi lawan kita...”.

Artinya dalam mengabdikan kepada anak, guru secara canggih harus mampu menyadarkan dan membangkitkan semangat mengabdikan oleh anak kepada masyarakat, Ibu Pertiwi-nya, dan tentu pula kepada humanisme. Guru harus mampu memilih dan memberi berbagai rupa motivasi kepada murid untuk mengabdikan pada kepentingan di luar pamrih pribadi (*self-interest*)-nya, artinya murid diperkenalkan dengan kepentingan-kepentingan bersama (*mutual-interests*). Dengan demikian itulah, maka Ki Hadjar mengutamakan nilai-nilai “kebersamaan” (*mutualism*, *ke-jema'ah-an*) dan “kekeluargaan” (*botherhood*, *ke-ukhuwah-an*), yang senada dengan nilai-nilai dasar (*core-values*) konstitusional Indonesia. Guru di dalam mitologi Jawa sangat tinggi derajat kemuliaan dan martabatnya, yang digambarkan sebagai “ Sang

minderwaardig-an (menghilangkan segala bentuk *servility*, rendah-diri, *underdog mentality*).

◦Pendidikan mengangkat kemampuan bangsa.

◦Pendidikan untuk mendorong proses “modernisasi” (termasuk digitalisasi dan seterusnya), dengan tetap mempertahankan keindonesiaan.

◦Berwawasan global (mampu *proaktif* mendesain masa depan dunia);

◦Pendidikan untuk membudayakan nilai-nilai Pancasila.

Intercultural Collaboration Indonesia – Malaysia: “Implementation of Tamansiswa Philosophy”

Bathara Guru”, yang masa kini hanya disebut sebagai “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa”. Dan di sinilah Tamansiswa sebagai institusi Pendidikan menempatkan diri secara anggun, dengan nama “Per-Guru-an” Tamansiswa.

Ki Hadjar Dewantara sebagai anggota badan perumus Konstitusi Indonesia ikut merumuskan *draft* Pasal 31 UUD 1945, yang kemudian menjadi final, Ayat 1: “*Tiap-tiap warganegara berhak mendapat pengajaran*”; Ayat 2: “*Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional...*”.

Ini penting untuk dipahami. Di dalam *Preambul* Konstitusi Indonesia dikatakan tugas konstitusional Negara antara lain disebutkan untuk “*mencerdaskan kehidupan bangsa*”, yang hakikatnya merupakan suatu konsepsi budaya, yang bukan sekedar untuk mencerdaskan otak bangsa. Konsepsi budaya ini dimaksud untuk meningkatkan harkat-martabat bangsa, yang telah direndahkan dan dinista oleh penjajahan Belanda selama beberapa abad. Penjajah Belanda telah menetapkan Kaum European (Kulit Putih) sebagai kasta sosial tertinggi, di bawah itu kasta Kaum Timur Asing (Cina, India, Arab), dan kasta sosial terendah adalah Kaum Inlander (Pribumi/Bumi Putera terjajah).

Di sinilah relevansi Mohammad Hatta merumuskan tujuan “mencerdaskan kehidupan bangsa”, yang artinya mengangkat harkat-martabat Kaum Bumi Putera, membentuk dan memberi *honorable identity and dignity*. Begitulah terbit sebagai Pasal 27 Ayat 1 Konstitusi Indonesia: “*Segala warganegara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan...*”. Sayang dalam kenyataan saat ini kaum Timur Asing, khususnya keturunan Cina masih merasa “lebih tinggi” daripada Kaum Bumi Putera, nampak *exclusiveness* mereka, mereka tinggal di kawasan pemukiman-pemukiman eksklusif, mendirikan bisnis-bisnis tertutup eksklusif, bahkan sekarang juga membuka berbagai

sekolah-sekolah/universitas eksklusif pula. Tentu hal ini tidak mendukung upaya untuk memperkuat *national cohesion*. Pendidikan nasional harus dapat menghilangkan *exclusivism* ini menuju pembauran.

Karena itulah kita mengharuskan berlakunya “satu sistem” pendidikan nasional seperti disebutkan pada Pasal 31 Konstitusi Indonesia di atas. Penegasan “satu sistem” pendidikan itu adalah untuk mentransformasi “kebhinnekaan” (*diversity*) menjadi “ketunggalikaan” (*unity*). Di bawah GARUDA PANCASILA, simbol Negara Indonesia tertulis diktum Bhinneka Tunggal Ika. Di sinilah pula PANCASILA (*Believe in one God, Humanity, Nationalism, Democracy, Social Justice*) yang merupakan ideologi nasional Indonesia, harus masuk ke ruang-ruang kelas sebagai *the national common denominator*, yang mentransformasi *kebhinnekaan* menjadi *ketunggalikaan*.

Akan menarik kita bicarakan mengenai *deschooling* yang dikemukakan oleh Ivan Illich (bukunya berjudul *Deschooling Society*, 1971), yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan di dunia pendidikan. *Deschooling*-nya Ivan Illich menganggap pendidikan di sekolah bertentangan dengan *humanity*.

Tentu menarik pula untuk kita bicarakan pandangan Profesor Clayton Christensen dari Harvard Business School baru-baru ini, yang mengatakan bahwa 50 persen dari 4.000 perguruan tinggi di US akan bangkrut dalam 10 sampai 15 tahun mendatang. Ia berangkat dari *The Theory of Disruptive Innovation*, yang dikembangkan dari buku *Innovator's Dilemma* dengan kesimpulan bahwa “pendidikan *online*” menjadi cara yang paling hemat biaya. Pendapat Christensen ini ternyata mendapat dukungan dari The U.S. Department of Education.

Kita di sini barangkali masih berpendapat bahwa sekolah merupakan tempat yang paling tepat untuk membentuk suatu atau sekumpulan “tujuan bersama” (*common goals*) yang

meliputi: ideologi, budaya dan *mindset* nasional. Oleh karena itu tetap diperlukan *mutual dialog* dengan tatap-muka, sehingga kita tetap menjadi manusia, tidak kehilangan hubungan homo-humanus yang humanistik, bukan yang mekanistik-robotik. “Setiap tempat adalah sekolah, dan setiap orang adalah guru”, kata Ki Hadjar. Hubungan permanen “guru-murid” di ruang-ruang kelas merupakan suatu *tutorial ciirlization*. Suatu *transformed nature of parenthood* sesuai dengan paham-paham ke-Nabi-an, Aristotleism (Plato’s *Academy*, Athens’ *Lyceum*), Ketaman-siswaan (Ki Hadjar *among system*), Tagore’s *Shantiniketan*, etc etc, yang menegaskan tentang pentingnya pendidikan melalui tatap-muka bersilaturahmi. Bagaimana pun tetap kita catat bahwa *deschooling*-nya Ivan Illich adalah ide hanyalah untuk merubah peran konvensional sekolah, bukan untuk menghapus sekolah.

Indonesia, dan juga barangkali Malaysia, harus mengawasi proses digitalisasi yang maju pesat ini. Digitalisasi melahirkan *disruptive innovation* ataupun *creative destruction* yang akan lebih banyak merugikan negara-negara berkembang. Negara-negara maju dengan kapitalisme-imperialistik mereka mengejar keuntungan ekonomi dengan melakukan *creative destruction* terhadap negara-negara berkembang, mereka menikmati *creativity at the cost of destruction* daripada *national interest* kita. Yang berarti pula *innovation* negara-negara maju dibiayai dengan *disruption* terhadap negara-negara berkembang.

Dikaitkan dengan hakikat pendidikan, maka jangan sampai kita menjadi budak digitalisasi, menjadi *the slave of digital robots*. Digitalisasi yang mengakibatkan dehumanisasi, tidak sesuai dengan Sunatullah, harus kita tentang.

Sebagai penutup, perlu saya kemukakan di sini bahwa Tamansiswa sangat dihargai oleh Negara, *logo* daripada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (The Indonesian Ministry of Education and Culture) mengambil simbol Garuda

Cakra dari Tamansiswa dan tertulis di bawahnya diktum daripada sistem among Tamansiswa, TUT WURI HANDAYANI (yang artinya “dari belakang seorang guru harus bisa memampukan dan memberikan dorongan serta arahan”).

Saya sangat berharap kerjasama Indonesia-Malaysia dapat senantiasa ditingkatkan, saya berbahagia kerjasama ini telah bermula antara UiTM Kedah Malaysia dengan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

Yogyakarta, 05 April 2019